

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dan mencerminkan perkembangan suatu perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara maka dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi negara tersebut baik, dan begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2000:5). Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dalam jangka panjang, untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat, kedua alasan ini dapat menjadi pendorong utama kepada pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan ideal.

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Joko Untoro (2010:39) mengatakan bahwa:

“Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang”.

Menurut Dian & Dudi (2016) Pertumbuhan ekonomi adalah

“Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat juga akan meningkat”.

Menurut Sadono Sukirno (2011:9) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat. Adapun menurut Schumpeter dalam Putong (2002:252) mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah penambahan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertumbuhan alami dari tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat tabungan.

Berdasarkan definisi-definisi pertumbuhan ekonomi diatas dapat dikatakan bahwa pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kegiatan aktivitas produksi barang dan jasa perekonomian disuatu negara secara berkesinambungan yang menunjukkan output perkapita dan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet (2000) terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita
- 2) Peningkatan produktivitas dalam negeri
- 3) Laju perubahan struktur negara yang tinggi
- 4) Terjadinya Urbanisasi
- 5) Ekspansi negara maju
- 6) Arus barang, modal dan orang antar bangsa.

Keenam ciri pertumbuhan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain, yang terjalin dalam urutan sebab akibat.

2.1.1.3 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan Boediono (1988), ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Jumlah stok barang-barang modal
- 3) Luas tanah dan kekayaan alam
- 4) Tingkat teknologi yang digunakan

2.1.1.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Adapun indikator dalam pertumbuhan ekonomi menurut Losina & Mustikawati (2008:119), adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Definisi produk domestik regional bruto Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang di hasilkan selama kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional.”

Menurut Drs.Suparmoko (1998:232) indikator pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui maju tidaknya suatu perekonomian diperlukan adanya suatu alat pengukur yang tepat. Alat pengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang artinya jumlah

barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar”.

Menurut Hera, ikhsan dan widyanti (2000: 23-24) indikator pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

“Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu”.

Menurut Sadono Sukirno (2012: 52) rumusan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PDB : Produk Domestik Bruto pada waktu tahun tertentu yang dihitung.

PDB t-1: Produk Domestik Bruto pada waktu tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator yang telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB (Produk Domestik Bruto) yang berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB) karena PDB menunjukkan total keseluruhan nilai akhir dari jumlah barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu negara.

2.1.1.5 Target Pertumbuhan Ekonomi

Target pemerintah tertuang jelas dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin ekonomi Indonesia meroket ke 7%,

(Suhariyanto:2020). Menanggapi hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan untuk dapat menjadi negara maju, Indonesia harus dapat menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 7% setiap tahunnya (Rizal Affandi Lukman:2019). Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah mengubah beberapa asumsi makro ekonomi. Perubahan asumsi akan dilakukan sebagai antisipasi pemerintah atas sentimen global yang kemungkinan besar masih akan mempengaruhi ekonomi domestik. (Sri Mulyani:2018). Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) target pertumbuhan ekonomi terkadang diubah menjadi kisaran 5% keatas karena bergantung pada situasi dan kondisi perekonomian tahun berjalan (Sri Mulyani :2018). Bank Indonesia melakukan revisi target pertumbuhan ekonomi karena mengalami banyak faktor yang mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Bank Indonesia:2014).

2.1.2 Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Dari satu periode ke periode lainnya tingkat harga berbagai barang akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga-harga atau dalam istilah ekonomi lebih sering disebut sebagai inflasi. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan kenaikan kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan hargaharga yang berlaku ke atas berbagai barang tidak mempunyai kelajuan yang sama. Ada yang mengalami perkembangan yang pesat, ada yang lambat dan mungkin ada pula yang mengalami kemerosotan harga. Kebijakan dan peran dari

pemerintah sangat diperlukan agar tidak terjadi inflasi yang tak terkendali yang bisa menyebabkan ekonomi negara menjadi tidak stabil.

2.1.2.1 Pengertian Inflasi

Menurut Boediono (1985:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga umum untuk menaik secara umum dan terus menerus atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai uang. Menurut Nopirin dalam Natsir (2014:253) Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat. Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Sedangkan Menurut Nicola, dkk (2016) inflasi adalah Kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga suatu barang, kenaikan bersifat umum, kegiatannya berlangsung secara terus-menerus. Menurut Iskandar Putong (2009:404) Inflasi dinyatakan sebagai berikut:

“Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan (I) lebih besar dari jumlah barang yang tersedia (S). Implikasi dari teori ini adalah Keynes memiliki pandangan bahwa untuk menjamin perekonomian yang stabil diperlukan peranan pemerintah seperti mengendalikan kebijakan fiskal di bidang perpajakan dan menekan pengeluaran pemerintah”.

Menurut Sukirno (2010:14) Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Menurut Losina & Mustikawati (2008:25) Inflasi adalah proses kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus atau turunnya nilai uang yang terus menerus. Menurut Wijayanta & Widyaningsih (2007:112) inflasi adalah sebagai berikut:

“Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, Inflasi akan mengakibatkan menurunnya daya beli

masyarakat, karena secara riil tingkat penfapatannya juga menurun”.

Menurut Lipsey, dkk (1992:4) Inflasi pada dasarnya merupakan gejala ekonomi yang berupa naiknya tingkat harga.

Berdasarkan beberapa pengertian inflasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun.

2.1.2.2 Macam-macam Inflasi

Boediono (1984:156) menggolongkan inflasi berdasarkan parah tidaknya sebagai berikut:

- a) Inflasi ringan (tingkat inflasi antara 0% - 10% setahun)
- b) Inflasi sedang (tingkat inflasi antara 10% - 30% setahun)
- c) Inflasi berat (tingkat inflasi 30% -100% setahun)
- d) Hiperinflasi (tingkat inflasi diatas 100% setahun)

Nopirin (1987) membedakan macam-macam inflasi atas dasar besarnya laju inflasi kedalam tiga kategori yaitu:

1. Merayap (*Creeping inflation*)
Creeping inflation ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan hanya berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.
2. Inflasi menengah (*Gallopning inflation*)
Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya dua digit atau tiga digit) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai akselerasi. Artinya: harga-harga minggu bulan pertama bulan ini lebih tinggi dari minggu pertama bulan lain dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.
3. Inflasi tinggi (*Hyper inflation*).
Inflasi tinggi (*Hyperinflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali.

Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang.

2.1.2.3 Sebab-sebab Terjadinya Inflasi

Menurut Nopirin (1987:30) Sebab-sebab terjadinya inflasi dibedakan dua macam, yaitu:

1. Timbulnya permintaan masyarakat terhadap berbagai macam barang terlalu kuat. (*demand inflation*). Mula-mula terjadinya demand inflation adalah karena adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*) akan barang-barang bertambah, misalnya bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah, sedangkan produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya akan menaikkan harga, maka terjadilah inflasi.
2. Timbulnya kenaikan ongkos produksi. Inflasi yang timbul karena terjadinya kenaikan ongkos produksi dinamakan (*cost inflation*). Biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan timbulnya penurunan penawaran total yang diakibatkan adanya kenaikan biaya produksi.

2.1.2.4 Indikator Inflasi

Menurut Drs. Suparmoko, (1998:210) indikator inflasi adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi 150 macam barang untuk meneliti inflasi itu biasanya macam barang dikelompokkan lagi menjadi kelompok bahan makan, kelompok sanang, kelompok perumahan dan kelompok lain-lain”.

Menurut (Iskandar Putong,2002:255) indikator inflasi adalah sebagai berikut:

“Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing – masing tingkat harga (barang- barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok /utama bagi masyarakat). Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh komsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK atau Consumer Price Index = CPI)”.

Menurut Hera, ikhsan dan widyanti (2002:44) indikator inflasi adalah sebagai berikut:

“Tinggi rendahnya inflasi pada suatu negara pada suatu waktu tertentu tergantung pada indikator yang digunakan dan tahun dasar yang digunakan. indikator inflasi yang dapat digunakan, yaitu Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Indeks Biaya Hidup (IBH). IHK mengukur harga-harga sekeranjang barang-barang yang dianggap mencerminkan konsumsi masyarakat secara rata”.

Menurut Sadono Sukirno, (2012: 52) rumusan yang digunakan untuk menghitung inflasi adalah:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu tahun tertentu yang dihitung.

IHK_{n-1}: Indeks Harga Konsumen pada waktu tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator inflasi yang telah dijelaskan diatas maka dapat dikatakan indikator untuk mengukur inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu ukuran untuk harga rata-rata barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) karena Indeks ini yang menghitung perubahan harga rata-rata dari

kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga pada waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa.

2.1.3 Realisasi Penerimaan PPh dan PPN

2.1.3.1 Pengertian PPh dan PPN

Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh N0.17 Tahun 2000 yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Rimsky Judisseno (2004:50) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut:

“suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukannya”.

Menurut Resmi (2013:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Berdasarkan definisi pajak penghasilan diatas maka dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas semua penghasilan yang diterima pada tahun pajak. Menurut (Sukardji, 2014:29) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

“PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di

setiap jalur produksi dan distribusi. PPN bukan merupakan pajak berganda melainkan pajak terutang yang dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluarnya”.

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017:265) “PPN dan PPnBM adalah pemungutan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungutan yang ditunjuk (misalnya bendahara pemerintah) atas pengkonsumsian barang atau jasa kena pajak”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pasal 4 ayat 1 secara terperinci mengemukakan pengertian PPN sebagai berikut:

- “PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, PPN adalah pajak yang dikenakan atas:
- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - b. Impor Barang Kena Pajak
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) baik konsumsi barang atau jasa, yang pemungutannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan PPh dan PPN

Menurut Kuncoro (2013) Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan adalah Pencapaian Target Penerimaan PPh atau Realisasi Penerimaan PPh. Sedangkan Menurut Siti Kurnia, (2017:84) Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:30) Indikator dari Penerimaan Pajak adalah Jumlah dari Realisasi Penerimaan Pajak yang dicapai. Berdasarkan indikator-indikator penerimaan PPh dan PPN diatas maka dapat dikatakan indikator penerimaan PPh dan PPN adalah Target dan Realisasi dari Penerimaan PPh dan PPN.

2.2 Kerangka Pemikiran

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Kegiatan ekonomi meliputi produksi barang dan jasa, dan barang dan jasa tersebut tidak terlepas dari pengenaan PPh dan PPN. Pada level makro, penghasilan total dari seluruh penduduk dalam sebuah negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin besar kenaikan PDB dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut memberikan dampak bertambahnya penerimaan pajak. Karena saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang biasanya ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, menyebabkan permintaan barang dan jasa akan mengalami kenaikan.

Naiknya permintaan akan mendorong perusahaan menambah penawaran dengan meningkatkan produksi, oleh karena itu para pelaku usaha membutuhkan

tenaga kerja untuk membantunya dalam melakukan proses produksi. Terbukanya peluang lapangan pekerjaan dapat mengurangi tingkat pengangguran sehingga peningkatan produksi dapat meningkatkan pendapatan baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Semakin tinggi pendapatan atau penghasilan masyarakat akan mendorong tingkat konsumsi, penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan PPh sebagai Pajak Penghasilan dan PPN sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang juga mengalami kenaikan atau peningkatan pada penerimaannya.

Penurunan nilai mata uang menyebabkan kenaikan harga barang-barang secara umum yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan juga. Kenaikan harga karena inflasi ringan dapat menguntungkan para produsen karena pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari biaya produksi. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Secara otomatis meningkatkan harga jual, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.

Akan tetapi bagi masyarakat berpenghasilan tetap, kenaikan harga dapat memicu penurunan terhadap permintaan barang dan jasa, yang akan diikuti oleh perusahaan atau produsen mengurangi jumlah penawaran barang dengan mengurangi jumlah produksinya. Sehingga menyebabkan jumlah pendapatan perusahaan mengalami penurunan, demikian juga dengan pendapatan masyarakat

karena terjadinya penurunan penggunaan faktor produksi tenaga kerja sehingga Pajak Penghasilan (PPH) akan menjadi berkurang.

2.2.1 Keterkaitan antara Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan perkembangan perekonomian di suatu negara dari waktu ke waktu, dimana kegiatan produksi dan jasa dalam masyarakat akan meningkat. Jika produksi dan jasa meningkat, tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPh dan PPN, karena setiap produksi yang dikeluarkan akan dikenakan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Apabila produksi meningkat, hal ini akan mempengaruhi jasa juga, karena produksi yang banyak akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula, sehingga dari jasa tersebut dikenakan PPh atas penghasilan yang diperolehnya jika melebihi PTKP. Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung. Berdasarkan konsep teori penghubung menurut Hidayat&Fithra(2015:143) perekonomian yang sedang tumbuh akan memberikan dampak positif bagi penerimaan perpajakan, terutama disebabkan tingkat produksi dalam negeri yang meningkat, pendapatan masyarakat yang membaik dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Perekonomian domestik maupun global di proyeksikan mengalami perlambatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi realisasi penerimaan pajak pada masa yang akan datang. Menurut Anggito Abimanyu (2011:24) Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN, baik pada sisi pendapatan negara maupun sisi belanja

negara. Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN.

Konsep keterkaitan tersebut ditunjang dengan hasil-hasil penelitian terdahulu oleh Khanghua zeng, shan li & qiang li (2013) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap jumlah total pendapatan dan struktur pajak. Dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan total pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi stabil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herman (2007) Berdasarkan hasil regresi peningkatan PDB telah meningkatkan penerimaan PPh dan PPN dengan hasil yang lebih besar menunjukkan korelasi yang sangat signifikan. Menurut Norman Sitinjak (2016) Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pusat yang artinya adalah semakin tinggi PDB maka penerimaan pajak semakin tinggi.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dirumuskan Hipotesis 1 penelitian ini adalah H1: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPh dan PPN.

2.2.2 Keterkaitan antara Inflasi dengan Realisasi Penerimaan PPh dan PPN

Inflasi dapat dikatakan kenaikan harga barang pada produksi dan jasa, dikarenakan banyaknya jumlah uang beredar ataupun permintaan yang banyak sedangkan penawarannya sedikit. Harga-harga produksi dan jasa menjadi lebih tinggi, apalagi jika konsumsi masyarakat meningkat hal ini tentunya akan berdampak pada jumlah penerimaan PPh yang menandakan pendapatan masyarakat bertambah. Ada pula yang mengalami penurunan pendapatan karena pengurangan

tenaga kerja dari produsen karena harga yang mahal karena inflasi yang parah terkadang bisa memicu penurunan produksi, sehingga dapat mengurangi jumlah PPh. Sedangkan inflasi yang ringan dapat menguntungkan produsen karena harga jual yang tinggi dari biaya yang dikeluarkan saat proses produksi, dimana harga jual yang tinggi tersebut dapat menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang tentunya akan menambah peningkatan pada penerimaan PPN dari inflasi yang terjadi pada produksi dan jasa. Kaitan variabel ini muncul dalam kerangka pemikiran peneliti didukung oleh teori-teori penghubung.

Berdasarkan konsep dari teori penghubung menurut (Allen larry, 2009:240) menyebutkan tingkat inflasi dapat menyebabkan penyusutan pada penerimaan pajak. (Rosyidi, 2002:119) mengatakan terdapat perbedaan antara pengetahuan ekonomi sisi pemerintahan dengan sisi ekonomi penawaran antara inflasi dengan pajak. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat akan mengalami perubahan, yang berdampak pada penerimaan pajak. (Latumerissa, 2015:178-179) berpendapat bahwa Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga dapat dikatakan dampak yang ditimbulkan inflasi tidak selalu merugikan, ada saat dimana inflasi memberikan keuntungan, hal tersebut tergantung pada bagaimana kondisi perekonomian saat inflasi terjadi. Inflasi dapat mempengaruhi perubahan pada pendapatan, perubahan dapat memberikan keuntungan apabila inflasi mendorong perkembangan perekonomian seperti mendorong produsen memperluas produksinya. Sedangkan inflasi memberikan kerugiannya pada masyarakat

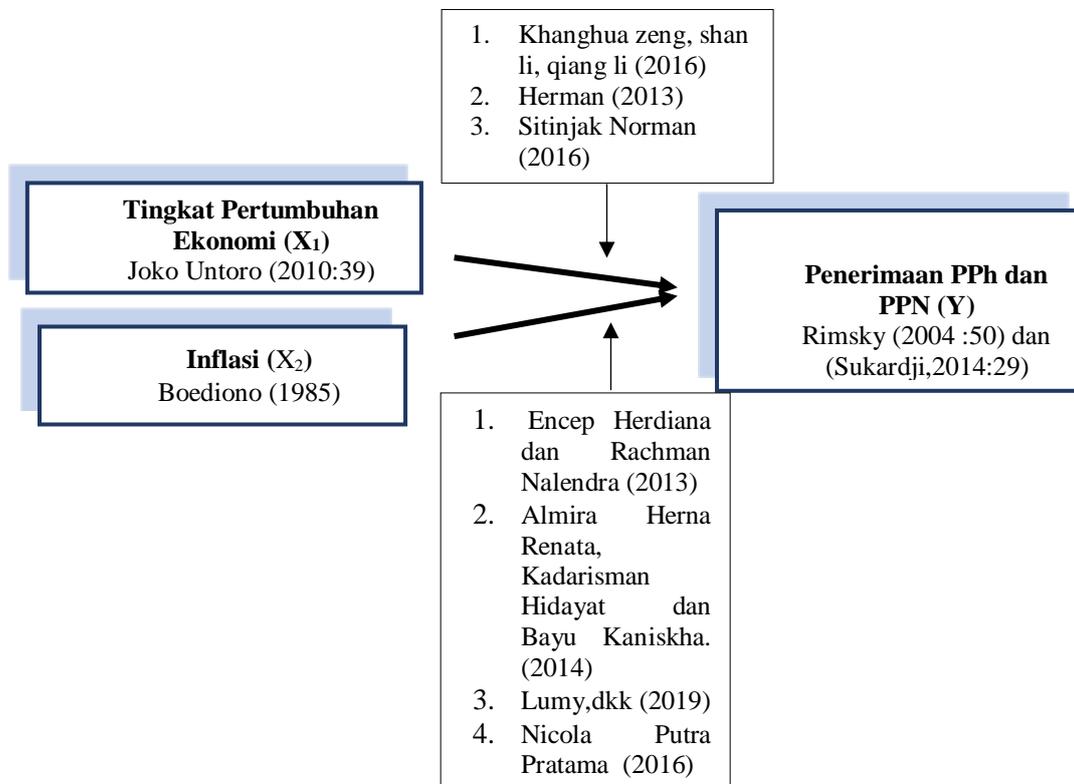
berpenghasilan tetap karena tingkat pembelian barang dan jasa masyarakat mengalami penurunan.

Konsep keterkaitan tersebut ditunjang dengan hasil-hasil penelitian terdahulu oleh Encep & Rachman (2013) berpendapat bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Masalah yang muncul pada penerimaan pajak belum mencapai target karena tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nicola Putra (2016) yang mengatakan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan menurut Almira, Kadarisman dan Bayu (2016) Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima. Kemudian menurut Lumy dkk, (2019) Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yang artinya apabila inflasi naik akan menyebabkan penerimaan pajak daerah juga naik.

Berdasarkan premis-premis diatas maka dirumuskan Hipotesis 2 penelitian ini adalah H2: Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPh dan PPN.

Berdasarkan teori penghubung dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Nanang Martono (2014:67), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoretis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji kebenarannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPh dan PPN.

H2: Tingkat Inflasi Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan PPh dan PPN.